

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung)

Febby Suryatrisna S.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi
Jl. Raya Cibeer No. 148, Cimahi Selatan

Abstrak : Perbaikan transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan perombakan yang dilakukan pemerintah terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan era orde baru ke era reformasi menuntut pelaksanaan akuntabilitas publik dalam melaksanakan setiap aktivitas kemasyarakatan dan pemerintahan. Terkait dengan masalah akuntabilitas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan kinerja kinerja akuntabilitas pemerintah daerah. Beberapa hal tersebut ialah terkait dengan *administrative accountability* dan *professional accountability*, isu pokok yang muncul adalah buruknya kinerja pengelolaan anggaran daerah. Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Kebenaran penelitian kualitatif adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang diukur berdasarkan dimensi Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran; Akuntabilitas Manajerial; Akuntabilitas Program; Akuntabilitas Kebijakan; dan Akuntabilitas Finansial secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Meskipun masih terdapat indikator kejujuran yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. (2) Beberapa faktor yang mendukung terhadap cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu antara lain : Meningkatnya komitmen pemerintah daerah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama masyarakat miskin/tidak mampu terhadap akses pelayanan kesehatan, pemenuhan amanah peraturan perundangan tentang penyediaan anggaran oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) untuk akses pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional; Koordinasi dengan berbagai *stakeholder* dalam rangka pemenuhan anggaran dan sumber daya manusia kesehatan; Pembangunan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan; serta Pembinaan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan kompetensi pelayanan kesehatan; dan Peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendekatan akses kesehatan ke masyarakat dan Sosialisasi pelayanan kesehatan rujukan. (3) Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung diantaranya masih tingginya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular (PTM), masih kurangnya tenaga yang berkompeten dalam penanganan kasus penyakit serta pengetahuan di masyarakat yang masih kurang tentang preventif dan promotif kesehatan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Kinerja Instansi Pemerintah

1. Pendahuluan

Akuntabilitas merupakan hasil kerja yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta dapat pula dipertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi, efisiensi, dan efektivitas harus dapat dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perkembangan sektor publik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini mengenai kuatnya tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas lembaga-lembaga publik, baik pada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan tersebut meliputi perlu dilakukannya sebuah transparansi kepada publik serta pemerintah juga perlu melakukan pemberian informasi kepada publik yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik.

Sejak era reformasi, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang besar dan cukup mendasar dalam bidang pemerintahan. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya keinginan diterapkannya akuntabilitas dan transparansi kinerja akan pengelolaan sektor publik. Ungkapan *good or clean governance* dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah. Selama beberapa tahun yang lalu, kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai stabilitas pemerintah.

Sedangkan dalam beberapa tahun terakhir ini, di masa reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintahan yang bersih. Akibatnya, mekanisme yang dipraktekkan pada masa lalu diganti dengan mekanisme transparansi yang lebih sesuai dengan keadaan pemerintah sekarang. Saat ini sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada outcome. Sehingga kinerja merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam instansi pemerintah sebagai organisasi yang memberikan pelayanan publik. Akan tetapi pada prakteknya, kinerja tidak dilaksanakan sesuai dengan konsep yang ada. Banyak permasalahan yang berkaitan dengan kinerja, terutama permasalahan mengenai kinerja pegawai. Banyak pegawai yang tidak tahu tentang

konsep dari kinerja itu sendiri, mereka hanya melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya saja, tanpa mempedulikan bagaimana *output* dan *outcome* atas kinerja yang telah dilaksanakan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2017:12).

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan peneliti dalam mengetahui informasi dan memaparkan berdasarkan objek permasalahan, yaitu tentang analisis akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Selain itu ungkapan konsep tersebut lebih menghendaki makna yang ada dibalik deskripsi data tersebut, oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Analisis akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Syahrudin Rasul (2002:11) menyebutkan indikator dari analisis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
2. Akuntabilitas manajerial
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan
5. Akuntabilitas finansial.

3. Pembahasan

Untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, penulis mengacu pada Model Analisis Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung: Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran; Akuntabilitas Manajerial; Akuntabilitas Program; Akuntabilitas Kebijakan; dan Akuntabilitas Finansial (Syahrudin Rasul, 2002:11).

Secara lebih detail hasil penelitian berdasarkan dimensi yang diukur sebagaimana dijelaskan di atas, diuraikan sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum. Sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat, tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.

Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung berusaha melakukan yang terbaik untuk mewujudkan akuntabilitas kejujuran dan hukum dengan mematuhi peraturan – peraturan yang ada seperti Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Hal ini berusaha dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung semaksimal mungkin karena berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu bidang kesehatan sehingga dapat memberikan contoh kepada instansi lain. Kaitannya dengan kepatuhan terhadap

hukum, berdasarkan hasil wawancara terhadap para informan, secara umum memberikan tanggapan bahwa dalam pelayanan di bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mempunyai peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Pengabaian terhadap salah satu aturan peraturan perundangan-undangan tersebut dapat menjadi kendala terhadap pemberian pelayanan kesehatan tersebut. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung telah berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung telah menjadi organisasi yang sehat, serta terbebas dari praktik maladministrasi yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang terlibat di dalamnya.

Dalam kaitannya dengan dengan akuntabilitas kejujuran, berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh para informan, secara umum menjelaskan bahwa aspek kejujuran dalam pemberian pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menjadi salah satu prioritas yang dijunjung tinggi. Namun, kejujuran berkaitan dengan aspek batin seseorang, dalam mengukur aspek batin tersebut tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tidak bisa diukur secara statistik. Jika kejujuran diartikan sebagai praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka dapat dikatakan bahwa termasuk di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ditemukan beberapa indikasi pelanggaran, antara lain seperti dokumen asuransi yang tidak beres, tagihan perawatan yang tidak sah; pembelian obat dan bahan habis pakai yang fiktif; penjualan bahan dan obat yang tidak sesuai aturan dan cenderung merugikan masyarakat; dokter tidak aktif menangani pasien (mewakulkan ke dokter lain atau residen), namun menerima

jasa; kolusi dengan pabrik/distributor obat dan alat kesehatan yang merugikan pasien.

Di level sistem-sistem manajemen rumah sakit, dan lingkungan rumah sakit, terjadi antara lain : saat pembelian alat-alat kesehatan (alkes) dan obat; suap/gratifikasi misal dalam perijinan atau akreditasi rumah sakit; dalam konstruksi RS dan Puskesmas; penyelewengan dana Jamkesmas-Jamkesda dan bantuan sosial kesehatan; memberikan dana illegal ke pimpinan pemerintah daerah agar menjadi pejabat struktural di RS atau menjadi pegawai. Terjadinya korupsi bahkan sudah sampai korupsi yang "*by design*". Sebagai gambaran pembelian alat direncanakan oleh oknum eksekutif, dengan dorongan dari penjual alat kesehatan. Direktur rumah sakit dapat terpojok untuk memberikan tanda tangan yang kemungkinan dapat berujung pada korupsi. Berdasarkan indikasi sebagaimana dijelaskan di atas, praktik-praktik tersebut pada dasarnya terjadi di beberapa instansi di Indonesia termasuk di dalamnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, namun hal tersebut dikemas di balik ketentuan-ketentuan hukum sehingga terhindar dari dugaan pelanggaran hukum.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas manajerial juga diartikan sebagai harapan bahwa para manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya dan menekan berbagai aspek negatif kegiatan, dan menjamin bahwa program diatur dengan integritas dan sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para informan berkaitan dengan akuntabilitas manajerial sebagaimana dijelaskan di atas, secara umum dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung telah berjalan dengan baik sehingga mempengaruhi terhadap pertanggungjawaban, kualitas kerja, ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan, produktivitas kerja, pengendalian biaya serta mampu menekan aspek-aspek negatif dari kegiatan yang dilakukan. Artinya, secara umum aspek akuntabilitas manajerial dapat dikatakan telah berjalan dengan baik.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program dapat diartikan bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang akan ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dalam hal ini, untuk tahun 2021 capaian yang diperoleh cukup baik yaitu memiliki persentase yang tinggi bahkan tertinggi mencapai 200% namun ada juga yang mencapai -103%.

Berdasarkan tanggapan informan, Program Indonesia Sehat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem

rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. 3) Jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Permasalahan dan isu strategis yang menjadi dasar pertimbangan dalam upaya pelayanan kesehatan adalah masih belum terpenuhinya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang masih perlu pembenahan, peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, peningkatan aksesibilitas serta mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan yang masih rendah, peningkatan pembiayaan kesehatan serta manajemen, regulasi dan system informasi kesehatan yang masih rendah.

Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat adalah :

1. Menurunkan Angka Kesakitan
2. Meningkatkan Indeks Kesehatan Kabupaten Bandung
3. Meningkatkan Angka Harapan Hidup Penduduk
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga prasejahtera
5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, remaja, dan lansia.
6. Meningkatkan CSR di bidang kesehatan
7. Meningkatkan jumlah sarana kesehatan yang dikelola oleh swasta tetapi tetap mendapat pengawasan dari pemerintah.

d. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan

mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atau kebijakan – kebijakan yang diambil DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menurut tanggapan informan telah dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan di hadapai di kemudian yang akan datang. Ciri yang menonjol dari suatu kebijakan bahwa setiap kebijakan mempunyai konsekuensi dan menyentuh masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya adalah pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas kebijakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik dan bertanggungjawab. Ini juga dapat dilihat dari adanya kesadaran bagi setiap pegawai bahwa mereka terikat dalam organisasi yang memiliki aturan dan kebijakan sehingga mereka harus melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan ketentuan tersebut. Terlihat juga dengan tidak adanya keluhan petugas mengenai ketentuan atau kebijakan yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mengenai pelaksanaannya.

e. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan

kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang diukur berdasarkan dimensi Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran; Akuntabilitas Manajerial; Akuntabilitas Program; Akuntabilitas Kebijakan; dan Akuntabilitas Finansial secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Meskipun masih terdapat indikator kejujuran yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
2. Beberapa faktor yang mendukung terhadap cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu antara lain : Meningkatnya komitmen pemerintah daerah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama masyarakat miskin/tidak mampu terhadap akses pelayanan kesehatan, pemenuhan amanah peraturan perundangan tentang penyediaan anggaran oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) untuk akses pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional; Koordinasi dengan berbagai *stakeholder* dalam rangka pemenuhan anggaran dan sumber daya manusia kesehatan; Pembangunan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan; serta Pembinaan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan kompetensi pelayanan kesehatan; dan Peningkatan pelayanan

kesehatan dengan pendekatan akses kesehatan ke masyarakat dan Sosialisasi pelayanan kesehatan rujukan.

3. Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung diantaranya masih tingginya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular (PTM), masih kurangnya tenaga yang berkompeten dalam penanganan kasus penyakit serta pengetahuan di masyarakat yang masih kurang tentang preventif dan promotif kesehatan.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Agus, Dwiyanto. 2006. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik". Yogyakarta: Gadjahmada University Press
- Bernardin, H.J. & Russel, J.E.A (1993). *Human Resource Management an experiential approach*. Singapore: Mc Graw-Hill, Inc
- Hessel, Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana
- Keban, Yermias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raba, Manggaukang. 2006. *AKUNTABILITAS Konsep dan Implementasi*. Malang. UMMPress
- LAN. 2015. *Akuntabilitas*. Jakarta: LAN RI
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan. Anggaran*. Jakarta : Detail Rekod
- Singarimbun Masri & Effendi Sofyan, 1982, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- _____, 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Etika Administrasi Negara*. PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta.
- Ratminto, & Septi Winarsih Atik. 2005. "Manajemen Pelayanan" Jogja: Pustaka Pelajar

Suyadi Prawirosentono.(1999). Manajemen sumber Daya Manusia (Kebijakan Kinerja Karyawan), Kiat membangun Organisasi Kompetitif menjelang Perdagangan Bebas Dunia, Edisi Pertama. Yogyakarta;BPFE